

Konstruksi “Islam Moderat” Pasca Aksi Bela Islam 212

Construction of “Moderate Islam” Post *Aksi Bela Islam 212*

Juharmen

Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia
Jl. Lintas Jambi - Muara Bulian KM.16, Simpang Sei Duren, Jambi Luar Kota, Muaro
Jambi, Jambi 36361
juharmen@uinjambi.ac.id

Abstrak: Artikel ini mengkaji tentang eksistensi Islam moderat dalam dinamika politik Islam di Indonesia pasca Aksi Bela Islam. Adapun focus tulisan ini bersumber dari dua pertanyaan, yakni; Bagaimana Historisitas Aksi Bela Islam 212? Dan bagaimana relasi Islam moderat dengan Aksi Bela Islam? Tulisan ini merupakan kajian kepustakaan yang didukung oleh referensi yang relevan melalui pendekatan historis dengan kesimpulan; Pertama, Historisitas Aksi Bela Islam tidaklah berdiri sendiri, melainkan ditopang oleh sejarah lain yang mendahuluinya, salah satunya berasal dari kecemburuan sebagian kelompok Islam jika Jakarta dikuasai oleh non Muslim. Namun yang lebih penting, bahwa Aksi Bela Islam memiliki kemungkinan upaya strategis dalam menyusun kekuatan politik sebagai “gerakan dari bawah” untuk mengikat masyarakat kepada konservatisme—sekalius membangun kekuatan politik melalui oposisi pemerintah. Kedua, NU dan Muhammadiyah sebagai kelompok “Islam moderat” memiliki kontribusi terhadap besarnya partisipasi dan ketertarikan masyarakat dalam Aksi Bela Islam, sebagai imbas dari tidak adanya ketegasan dua Ormas tersebut dalam menyikapi dugaan penodaan agama ataupun Aksi Bela Islam.

Kata Kunci: Islam Moderat, Aksi Bela Islam, Islam dan Politik

Abstract: This study aimed at finding the existence of moderate Islam in the dynamics of Islamic politics in Indonesia after “Aksi Bela Islam”. The focus of this paper comes from two questions. First, How is the Historicity of the “Aksi Bela Islam 212”? Second, how is the relationship between moderate Islam and “Aksi Bela Islam”? This paper was a literature study which was supported by relevant references. The writer used a historical approach in this study. The results of this study showed that; First, the historicity of the “Aksi Bela Islam” does not stand alone, but it was supported by

other preceded histories. One of them comes from the jealousy of some Islamic groups towards Jakarta which was controlled by non-Muslims. However, the most important thing was that “Aksi Bela Islam” tended to have strategic efforts in organizing political power as a “movement from below” to bind the public to conservatism as well as building political power through government opposition. Second, NU and Muhammadiyah as a group of “moderate Islam” have contributed to the amount of community participation and interest in the “Aksi Bela Islam”, as a result of the lack of firmness of the two CSOs in responding to blasphemy or “Aksi Bela Islam”.

Keywords: Moderate Islam, *Aksi Bela Islam*, Islam and Politics

A. Pendahuluan

Aksi Bela Islam jilid I, II dan III, atau yang sangat familiar dengan sebutan aksi 212, merupakan wajah baru dari gerakan Islam Indonesia yang mendapat respon dari berbagai kalangan masyarakat. FPI sebagai motor penggerak bersama organisasi Islam lainnya yang dicap “radikal”—populer dengan sebutan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama Indonesia (GNPF-MUI)—berhasil mencuri perhatian umat Islam Indonesia. Pemberitaannya menjadi *tranding topic* di beberapa media lokal, nasional, bahkan internasional, sehingga puncaknya aksi 212 pada tanggal 2 Desember 2016 mendapat julukan sebagai gerakan terbesar pasca runtuhnya Orde Baru,¹ sekaligus gerakan Islamis terbesar dalam sejarah Indonesia.²

Aksi Bela Islam lahir sebagai imbas dari pernyataan kontroversial Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) pada tanggal 27 September 2016 ketika melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu, munculnya kalimat “...dibohongi pakai surat al-Maidah 51...” viral di media sosial dan menimbulkan gejolak di masyarakat khususnya umat Islam dan berakhir di ‘meja hijau.’⁴ Menariknya, “212” menjadi sebagai *brand* pergerakan yang lebih luas, seperti “alumni 212” sebagai wadah baru yang menampung aspirasi peserta aksi, ataupun gerakan ekonomi berbasis syariah yang disebut dengan 212 *Mart* dan beberapa bentuk gerakan ekonomi lainnya.

Tingginya partisipasi umat Islam dalam Aksi Bela Islam 212, ternyata tidak mendapatkan restu dari NU dan Muhammadiyah sebagai Ormas “Islam

Moderat.”⁵ Dua Ormas tersebut menyatakan ketidaksertaannya dalam Aksi Bela Islam, bahkan melarang masyarakat dan anggotanya untuk turun ke jalan, sekaligus menghimbau peserta aksi untuk tidak membawa atribut-atribut yang berkaitan dengan dua organisasi Islam tersebut sebagai NU dan Muhammadiyah dalam memposisikan dirinya di luar arus Aksi Bela Islam.

Namun menariknya, meskipun NU dan Muhammadiyah telah menentukan posisinya, realitas memperlihatkan “ketidakpatuhan” masyarakatnya sendiri, di mana gambaran yang terlihat dalam Aksi Bela Islam 212 –selain dilakoni oleh Ormas Islam *non-mainstream*,⁶ juga dihadiri oleh masyarakat kalangan NU dan Muhammadiyah,⁷ bahkan beberapa pondok pesantren yang berafiliasi kepada NU juga ikut andil dalam Aksi Bela Islam, begitu juga beberapa elit Muhammadiyah yang malah terlihat aktif dalam gerakan tersebut.⁸

Tingginya partisipasi umat Islam dalam Aksi Bela Islam, dan “terpinggirnya” NU dan Muhammadiyah dalam wacana penistaan agama dan ulama, melahirkan dinamika baru terhadap Islam politik di Indonesia yang mengisyaratkan telah lahirnya otoritas keagamaan baru selain NU dan Muhammadiyah.⁹ Dari sinilah lahir dua pertanyaan yang perlu dibahas dalam tulisan ini; Bagaimana historisitas Aksi Bela Islam 212? Dan bagaimana relasi ‘Islam moderat’ dengan Aksi Bela Islam?

B. Islam Moderat

Deliar Noer mencoba membagi karakteristik Islam politik di Indonesia dengan sebutan “nasionalis netral agama” dan “nasionalis Muslim”, sebagai gambaran karakter Islam politik di Indonesia, di mana kaum nasionalis netral agama menolak dasar Islam yang didukung oleh kaum nasionalis Muslim.¹⁰ Tipologi tersebut kemudian dikembangkan oleh Endang Saifuddin Anshary dengan tipologi “nasionalis Islami” dan “Nasionalis sekuler,”¹¹ yang juga memiliki kesamaan dengan Nazih Ayubi yang membagi tipologi umat Islam sebagai Muslim politik (*political Islamist*), dan Muslim kultural (*cultural Islamist*),¹² yang melahirkan dua spektrum pemikiran politik Islam. *Pertama*, Islam harus menjadi dasar negara, syariat harus diterima sebagai konstitusi negara karena kadaulatan politik

ada di tangan Tuhan. *Kedua*, Islam tidak meletakkan suatu pola baku tentang teori negara (sistem politik) yang harus dijalankan oleh *ummah* karena istilah *dawlah* yang mempunyai pengertian sistem politik tidak dapat ditemukan dalam al-Qur'an, dan al-Qur'an bukanlah buku ilmu politik,¹³ sehingga tuntutan untuk mendirikan tatanan politik yang berlandaskan Islam bukanlah sebuah keharusan apalagi kewajiban.

Dalam diskursus pemikiran politik Islam modern, pemetaan terhadap karakteristik Muslim juga berkembang. Khaled Abou Fadl misalnya, mengklasifikasikan pemikiran politik Islam modern dengan menggunakan Istilah “moderat” dan “puritan”. Meskipun berbeda dengan klasifikasi lainnya seperti radikal, fundamentalis, ekstrimis dan lainnya, namun menurut Fadl, istilah moderat berasal dari al-Qur'an dan sunnah Nabi, di mana al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk menjadi moderat. Di sisi lain, sikap moderat juga diperlihatkan oleh sosok Nabi Muhammad SAW ketika dihadapkan pada dua pilihan ekstrim.¹⁴ Dengan demikian, menjadi “moderat” merupakan karakter yang harus dimiliki seorang Muslim sesuai dengan “tradisi” Islam yang telah ditunjukkan dalam kitab suci umat Islam dan telah diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW.

Menariknya menurut Abou Fadl, istilah “moderat” merupakan klasifikasi yang kompleks, sehingga tidak terwakili dengan istilah “modernis,” “reformis” ataupun “progresif”, sebab istilah modernis menyiratkan sebuah kelompok tertentu bersifat reaksioner dalam menghadapi tantangan modernitas. Sedangkan reformis dan progresif juga memiliki sisi negatif, sebab banyak dari kelompok tersebut yang mengklaim cerminan Islam yang benar namun di sisi lain, mereka juga terjebak dalam “kekakuan” agama. Sedangkan istilah “puritan” digambarkan Abou Fadl sebagai kelompok dengan ciri khas absolut dan tidak berkompromi dengan apa yang diyakininya, baik sebagai “fundamentalis”, “militan”, “ekstrimis”, “radikal”, “fanatik”, “jihadis” bahkan “Islamis.”¹⁵

Secara bahasa, Moderat atau *wasatiyah* dalam bahasa Arab, sinonim dengan *tawassut*, *i'tidal*, *tawazun*, *iqtisad* dan selaras dengan keadilan, yang memiliki arti posisi di tengah-tengah antara ekstrimitas. Sedangkan kebalikan dari *wasatiyah*

adalah *tatarruf* yang berarti ekstrim, radikal dan berlebihan. Selain itu *Wasatiah* juga berarti pilihan terbaik (Ali Imran: 110),¹⁶ sedangkan Wahbah Zuhaili berkesimpulan bahwa *wasatiyyah* berarti moderat dan keseimbangan (*i'tidal*) dalam keyakinan, moralitas dan karakter dalam memperlakukan orang lain dan dalam penerapan sistem sosial-politik dan pemerintahan.¹⁷ Namun sebagai sebuah konsep, kata moderat (*wasatiyyah*) merupakan kata transitif yang tidak berdiri sendiri tanpa memiliki subjek. Oleh karena itu, moderat sendiri tidak memiliki makna yang pasti, di mana banyak konotasi yang melekat pada konsep ini.¹⁸ Selain itu istilah moderat itu sendiri sering dipahami secara berbeda sesuai lokalitasnya, seperti media Barat ataupun dalam wacana politik, istilah moderat lebih umum ditujukan untuk umat Islam. James Petras mengungkapkan bahwa, moderat berarti Islamis yang mendukung kekuasaan. Sedangkan yang menyerang dan anti-imperialis dianggap sebagai teroris dan fundamentalis.¹⁹

C. Historisitas Aksi Bela Islam

Sejarah tidaklah berdiri sendiri, melainkan ditopang oleh sejarah lainnya, dan sejarah cenderung memiliki aktor penting yang memiliki peran strategis dalam setiap alurnya. Maka menggambarkan historitas Aksi Bela Islam perlu diawali dari himpitan sejarah yang lahir sebelum Aksi Bela Islam, agar historitas Aksi Bela Islam yang dikomandoi oleh FPI/Habib Rizieq tidak terlihat secara prematur melainkan sebagai satu gambaran yang utuh.

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merupakan keturunan Tionghoa-Kristiani yang pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur dan Plt Gubernur DKI Jakarta dari partai Gerindra. Timbulnya ketidaksepahaman antara Ahok dengan partai berakhir dengan pengunduran dirinya sebagai kader partai.²⁰ Kedekatan Ahok dengan PDI-P melahirkan spekulasi bahwa Ahok akan beralih ke PDI-P, meskipun belum terbukti secara jelas, namun kecurigaan itu akhirnya terjawab di tahun 2019, di mana Ahok resmi menjadi kader PDIP.²¹

Meskipun dengan karakter kepemimpinan yang “tidak biasa”, Ahok terkenal sebagai seorang yang tegas dan “ceplas ceplos”, namun cenderung terlihat tidak sopan bahkan dianggap arogan. Sebuah survei dari Media Survei Nasional

(Median) menyimpulkan bahwa Ahok memiliki kinerja yang bagus, meskipun tidak disukai masyarakat karena dianggap arogan.²² Kesimpulan dari survei tersebut mengidentifikasikan bahwa secara keseluruhan penerimaan masyarakat terhadap Ahok memang telah menjadi momok yang dilatarbelakangi oleh karakter personalnya sebagai pemimpin yang tak jarang berbicara kotor menganggangi etika ketimuran.

Jika ditelusuri hubungan Ahok dengan FPI, maka hubungan yang terbangun cenderung “panas”, khususnya pasca terpilihnya Jokowi menjadi presiden tahun 2014 dan Ahok menjabat sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta,²³ kondisi tersebut melahirkan perlawanan dari FPI melalui demonstrasi yang berbau sara, bahwa umat Islam tidak menginginkan Jakarta dipimpin oleh non-Muslim (Kafir).²⁴ Perseteruan FPI vs Ahok terus berlanjut terlebih dengan adanya wacana pembubaran FPI yang diupayakan oleh Ahok.²⁵ Sepertinya awal persoalan antara FPI dan Ahok adalah posisi Ahok sebagai “minoritas” yang memiliki jabatan strategis di Ibu Kota Indonesia dan ketidaksenangan kepada Ahok semakin besar dengan adanya dugaan-dugaan yang dialamatkan kepada Ahok, seperti korupsi,²⁶ ketidakberesan Reklamasi,²⁷ hingga pengusuran.²⁸

Deretan persoalan yang menimpa Ahok mencapai puncaknya pada tanggal 27 September 2016. Ahok selaku Gubernur Jakarta melakukan kunjungan kerja ke Pulau Seribu, pada kesempatan tersebut Ahok mengungkapkan, “...kan bisa saja dalam hati kecil bapak Ibu, nggak pilih saya karena dibohongi (orang) pakai surat al-Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa nggak bisa pilih karena takut masuk neraka, dibodohin, begitu, oh *nggak* apa-apa karena ini panggilan pribadi Bapak Ibu..” Munculnya kalimat “..dibohongi pakai surat al-Maidah..” menjadi viral di media sosial setelah Buni Yani mengunggah potongan video rekaman tersebut dengan judul ‘penistaan terhadap agama?’ dengan transkrip yang sedikit berbeda dari aslinya, yakni dengan hilangnya kata ‘pakai’ sehingga menjadi ‘dibohongi surat al-Maidah.’

Potongan rekaman terlanjur viral di masyarakat, situasi memanasi dengan berbagai argumen yang muncul di media sosial dan melahirkan dua kubu yang saling berseberangan antara yang pro Ahok dan yang kontra. Kondisi yang mulai

memanas, khususnya di jagad sosial media, dan semakin memuncak pasca pelaporan oleh FPI kepada kepolisian dan disusul oleh organisasi lainnya. pada tahap ini Ahok telah mengutarakan permintaan maafnya kepada masyarakat melalui media atas persoalan yang terjadi. Namun ternyata permintaan maaf Ahok tidak menyurutkan niat beberapa kelompok Islam untuk membawa persoalan tersebut ke ‘meja hijau’. Maka tanggal 14 Oktober 2016 ribuan massa yang mengatasnamakan Aksi Bela Islam berunjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta dengan tuntutan agar Ahok segera dihukum karena Ahok dinilai telah melakukan tindak pidana penistaan agama.²⁹

Dikomandoi oleh FPI di bawah Habib Rizieq Shihab, Aksi Bela Islam Jilid I diawali dengan sholat berjamaah di Masjid Istiqlal Jakarta, dan melanjutkan perjalanan aksi di depan kantor Bareskrim di Balai Kota DKI Jakarta dan memenuhi jalan Medan Merdeka Timur dan Jalan Medan Merdeka Selatan. Bela Islam Jilid I inipun berakhir setelah sholat ashar di jalan raya, namun sebelum bubar, Habib Rizieq mengancam akan melakukan demonstrasi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih banyak jika dalam tempo tiga minggu tidak ada perkembangan pengusutan kasus dugaan penistaan al-Qur’an yang dilakukan oleh Ahok.³⁰

Pada tanggal 4 November 2016, unjuk rasa kembali terjadi di Jakarta (Aksi Bela Islam Jilid II). Menariknya kondisi yang sama juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia, seperti Kota Semarang, Jawa Tengah, di mana sekitar 1000 orang massa melakukan orasi dengan berjalan menuju Polda Jateng, di Batam juga berlangsung aksi serupa di Polda Kepri, Palembang, aksi di Pekanbaru juga diikuti sekitar 2000 massa dari masjid Agung An-Nur hingga ke Polda Riau. Begitu juga beberapa daerah lain seperti Makassar dan Banjarmasin juga melakukan aksi serupa dengan tuntutan yang sama agar proses hukum dituntaskan terkait kasus dugaan penistaan agama tersebut.³¹ Adapun aksi di Jakarta memiliki massa yang lebih banyak, diperkirakan berjumlah 75.000 hingga 100.000 orang yang melibatkan pendiri FPI Habib Rizieq Shihab dan beberapa anggota DPR seperti Fadlizon dan Fahri Hamzah, yang menuntut Jokowi selaku kepala negara untuk bertemu dengan massa, namun keinginan tersebut tidak dapat dipenuhi

karena Presiden tidak berada di istana dan diwakili oleh Yusuf Kalla yang berjanji akan menyelesaikan kasus dugaan penistaan agama ini dalam dua minggu.³²

Meskipun Wakil Presiden telah menyampaikan janjinya kepada massa Aksi Bela Islam Jilid II, namun upaya tersebut tidak bisa menghindari terjadinya kerusuhan di malam hari yang disinyalir dilakukan oleh oknum yang sengaja memperkeruh suasana yang awalnya kondusif.³³ Meskipun demikian, pemerintah berjanji akan mengusut kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok harus berjalan secara transparan.³⁴ Tepatnya pada tanggal 16 November, Ahok ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama.

Pasca ditetapkannya Ahok sebagai tersangka, Ketua FPI Habib Rizieq dan komponen GNPF MUI kembali menyepakati akan digelarnya Aksi Bela Islam Jilid III atau yang akrab dengan sebutan Aksi 212. Adapun alasan dari penyelenggaraan aksi tersebut berkaitan dengan status tersangka Ahok yang masih bebas tanpa adanya penahanan oleh pihak kepolisian.³⁵ Kondisi ini dianggap oleh pihak penyelenggara telah melukai umat Islam dengan dibiarkannya Ahok bebas dari penahanan kepolisian. Kondisi terbut justru mendapat sambutan pahit dari kepolisian yang dikepalai oleh Tito Karnavian yang menganggap rancana aksi lanjutan tersebut disinyalir memiliki agenda tersembunyi, yakni makar terhadap pemerintah, sehingga pihak kepolisian melarang diselenggarakannya aksi tersebut karena dapat mengganggu ketertiban umum, yang berimbas kepada penindakan tegas—baik berupa pembubaran ataupun ancaman hukuman yang sesuai dengan KUHP—jika aksi tetap dilakukan.

Meskipun pihak kepolisian telah mengeluarkan larangan untuk melakukan aksi Jilid III, dan pihak MUI juga memberi himbauan agar aksi demonstrasi tidak dilakukan melainkan mengutamakan diplomasi dan musyawarah, namun Ketua Dewan Pembina GNPF MUI Habib Rizieq bersikeras bahwa aksi jilid III akan tetap diselenggarakan dengan alasan dijamin oleh konstitusi. Selain itu, menurut Rizieq pergelaran aksi jilid III akan digelar secara super damai dalam bentuk gelar sajadah yang akan diikuti oleh 67 Ormas.³⁶

Dengan adanya ketidaksepakatan antara pihak kepolisian dan panitia aksi jilid III berujung dengan diselenggarakannya pertemuan segitiga antara Kapolri, Ketua

FPI dan Ketua MUI pusat, sehingga dirumuskanlah kesepakatan bahwa aksi 2 Desember akan dilaksanakan di Monas dari pukul 08.00 sampai pukul 13.00 WIB.³⁷ Dengan demikian, selesailah kemelut tentang perizinan pelaksanaan aksi jilid III yang diselenggarakan di Jakarta. Namun, Aksi Bela Islam Jilid III yang telah direncanakan secara damai, ternyata dalam prosesnya—menurut panitia pelaksana—mengalami penggembosan-penggembosan yang dihadapi oleh para peserta.

Menurut Habib Rizieq, setidaknya terdapat lima upaya penghalangan aksi jilid III yang terjadi; *Pertama*, adanya fitnah yang muncul terkait Aksi Bela Islam yang dikaitkan dengan aksi makar.³⁸ *Kedua*, adanya isu penggembosan yang menggulirkan isu bahwa sholat di jalan tidak sah.³⁹ *Ketiga*, adanya upaya untuk menghalang-halangi peserta aksi dari daerah untuk pergi ke Jakarta.⁴⁰ *Keempat*, adanya penggembosan dari pimpinan keamanan negara yang membuat situasi menjadi tegang. *Kelima*, adanya upaya untuk membujuk sejumlah ulama, *Habaib* dan kiai agar tidak ikut serta dalam aksi 212.⁴¹

Menariknya, meskipun aksi tersebut mendapati bermacam tantangan selama proses pelaksanaannya, namun Aksi Bela Islam 212 dapat terlaksana dengan damai diikuti oleh ribuan bahkan jutaan masa termasuk dari kalangan NU dan Muhammadiyah.⁴² Selain itu, dalam aksi 212, beragam organisasi Islam juga ikut berpartisipasi dalam aksi tersebut, seperti FPI, HTI,⁴³ PERSIS,⁴⁴ WI (Wahdah Islamiyah),⁴⁵ PKS⁴⁶ dan Ormas Islam Lainnya.

Ketertarikan masyarakat terhadap aksi ini tidak dilatari oleh kepentingan yang tunggal, seperti kepentingan ideologis atau kepentingan politis *an sich* yang sangat fundamental. Sebagian masyarakat ada yang ikut aksi terdorong oleh ketokohan Habib Rizieq,⁴⁷ ada juga termotivasi ikut aksi karena memiliki kepentingan yang sama dengan Habib Rizieq,⁴⁸ ada juga yang ikut aksi karena memang tidak suka Ahok secara individu,⁴⁹ hingga ada juga masyarakat yang hadir hanya untuk berfoto-foto. Kondisi ini menandakan bahwa masyarakat yang hadir dalam Aksi Bela Islam terdiri dari beragam kepentingan.

Jika dilihat ke sejarah awal kemerdekaan Indonesia, setidaknya terdapat benang merah yang bisa ditarik dari pengalaman Aksi Bela Islam ini. Tingginya

partisipasi umat Islam dan diikuti oleh berbagai elemen Ormas Islam di Indonesia—bahkan dari kalangan NU dan Muhammadiyah—menandakan besarnya kekuatan umat Islam di Indonesia. kondisi ini kembali membayangi masa lalu di mana Islam politik pernah berjaya dibawah Masyumi sebagai partai tunggal umat Islam. Sedangkan pasca reformasi melalui Aksi Bela Islam (212), Islam politik kembali berupaya untuk menunjukkan taringnya kepada penguasa sebagai isyarat atas keberadaannya yang telah lama tidur dibawah bayang-bayang dua Orde sebelum reformasi.

Menariknya, ternyata Aksi Bela Islam tidak hanya menorehkan sejarahnya dalam dinamika politik Indonesia, dengan jumlah peserta yang fantastis, Aksi Bela Islam juga melakukan “pengikatan” melalui wadah lainnya, baik dalam bentuk “alumni 212” sebagai pengikat persaudaraan seluruh mantan peserta Aksi 212, ataupun dalam bentuk gerakan ekonomi seperti 212 Mart, Koperasi Syariah 212,⁵⁰ dan gerakan ekonomi lainnya yang membawa *brand* 212. Di mana ikatan yang terbangun tersebut menandakan bahwa Aksi 212 menjadi momentum untuk melakukan sebuah gerakan untuk menggerakkan umat Islam Indonesia menuju tatanan yang “Islami” versi 212.

Dengan perkembangan Aksi Bela Islam yang mulai merayap ke berbagai sektor termasuk ekonomi, maka Aksi Bela Islam tidak bisa hanya dipandang sebatas penolakan terhadap Ahok semata, sebab jika dilihat dari keberlanjutan dari Aksi Bela Islam yang berjilid-jilid, ia juga telah—dan bisa saja memang—menjadi sarana politik. Kondisi ini mengingatkan kembali kepada perjuangan Mohammad Nathsir yang mengungkapkan “kalau dulu (semasa Masyumi) kita berdakwah dengan politik, tetapi kini kita berpolitik melalui dakwah”,⁵¹ sehingga Islam politik di bawah Natshir telah merubah haluannya dari upaya “mengislamkan” Indonesia melalui Negara Islam kepada mengislamkan masyarakat Indonesia.

Aksi Bela Islam sebagai gerakan Islam politik juga memiliki kesamaan dengan upaya yang dilakukan oleh pendahulunya, dengan mengikat kesadaran dalam bentuk “alumni 212” hingga menggalakkan gerakan ekonomi berbasis syariah di negara sekuler sebagai upaya untuk mengikat masyarakat secara lebih

dalam. Selain itu, aksi 212 melalui alumninya telah melakukan gebrakan besar dibandingkan Mohammad Natsir, dengan adanya indikasi transaksi politik dengan oposisi dibawah partai Gerindra yang berhadapan dengan PDIP menuju pemilihan presiden 2019.⁵² Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang terjadi dengan Islam politik jika Gerindra dan koalisinya memenangkan Pemilu 2019?

D. NU, Muhammadiyah, dan Aksi Bela Islam

“Choosing the right terminology to label a set of beliefs and conviction is always difficult. Labels do not just *describe*; they also judge. Moreover, what seems moderate to one person could appear extreme to another.”⁵³

Istilah ‘moderat’ (*tawasshuth*) bukanlah peristilahan yang baru dalam khazanah keislaman, sebab ia hadir dalam tuntutan ajaran Islam itu sendiri. Namun istilah ‘moderat’ pada zaman kontemporer sangat erat kaitannya dengan meningkatnya ragam aksi brutal berbalut kepentingan agama—khususnya Islam—di mana kecurigaan terhadap aksi tersebut bermuara dalam bentuk aksi terorisme yang melanda dunia, termasuk Indonesia, di mana dampak dari besarnya gelombang ekstrimisme di dunia telah memberi dampak buruk terhadap imej Islam yang dijadikan tersangka utama atas kejahatan terorisme di dunia,⁵⁴ khususnya pasca tragedi 11 September 2001. Maka ‘moderat’ dalam konteks ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada dunia, bahwa mayoritas umat Islam adalah masyarakat yang moderat dan anti terhadap kekerasan yang cenderung dipopulerkan oleh kelompok-kelompok yang menggunakan “Islam” demi kepentingan pribadi atau kelompoknya.⁵⁵

Indonesia sendiri, pelabelan moderat cenderung disematkan kepada Ormas Islam *mainstream* NU dan Muhammadiyah. Dalam wacana politik NU, perilaku moderat secara umum disebut sebagai ‘*tawasshuth*’ dan didefenisikan sebagai ‘pendekatan jalan tengah di antara dua sikap ekstrem,’ di mana pemahaman terhadap ‘*tawasshuth*’ mengandung unsur ‘*tawazzun*’ yang berarti keseimbangan dan keselarasan, ‘*i’tidal*’ yang berarti keteguhan hati, tidak menyeleweng ke kiri dan ke kanan, dan ‘*iqtishad*’ yang berarti bertindak seperlunya dan tidak berlebihan.⁵⁶ Dalam prakteknya menurut NU sikap *tawasshuth* akan melahirkan

keseimbangan dan sintesis dalam Islam yang menyatukan dan mempererat hubungan antar umat Islam, sekaligus menolak aliran-aliran yang ekstrem, seperti Mu'tazilah, Jabariyah, Syi'ah, Qadariyah dan Khawarij.⁵⁷ Lebih jauh lagi, NU juga menolak pemahaman kelompok-kelompok (Ormas) Islam radikal yang sarat dengan kekerasan dan pemaksaan, Seperti halnya FPI (Front Pembela Islam) yang dikenal sebagai Ormas Islam yang sering membuat onar di lokasi-lokasi yang dianggap sumber maksiat.

Di sisi lain, Muhammadiyah memaknai “moderat” cenderung menggunakan istilah *wasathiyah* yang juga dimaknai sebagai sifat tengahan, sekaligus mengandung makna tidak bersifat serba ekstrem, di mana karakter moderat tersebut tercermin dari sepuluh sifat yang membedakan Muhammadiyah dari gerakan-gerakan Islam lainnya;⁵⁸ (1). Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. (2). Memperbanyak kawan dan mengamalkan *ukhuwah Islamiyah*. (3). Lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. (4). Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. (5). Mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. (6). *Amar ma'ruf nahi munkar* dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik. (7). Aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud *ishlah* dan pembangunan sesuai ajaran Islam. (8). Kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam, serta membela kepentingannya. (9). Membantu pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang diridhai Allah. (10). Bersifat adil serta korektif ke dalam dan ke luar dengan bijaksana.⁵⁹ Sepuluh sifat tersebut merupakan manifestasi Muhammadiyah dalam mempraktekkan sifat moderat sebagai sarana dalam menjalankan gerakannya.

Jika ditelusuri pemahaman moderat dari dua Ormas Islam di atas, sekilas akan terlihat bahwa gambaran besar yang ingin dicapai adalah posisi yang tidak condong (berpihak) ke kiri ataupun ke kanan, dengan tetap menjunjung tinggi *ukhuwah Islamiyyah*. Namun pada prakteknya, moderatisme tersebut justru menimbulkan keraguan dan dianggap sebagai posisi yang samar bahkan *debateble*

ketika dihadapkan dengan persoalan yang membutuhkan kejelasan sikap. Sebagai gambaran perdebatan “moderat” NU dan Muhammadiyah dapat dilihat dari hubungan dua Ormas tersebut dalam Aksi Bela Islam akhir tahun 2016, yang justru tergambar sebagai kemenangan kelompok konservatif, khususnya FPI dan “terasingkannya” NU dan Muhammadiyah dalam perhelatan tersebut.

Sebagai inisiator dari gerakan Aksi Bela Islam, FPI lebih memiliki kesamaan dengan NU dibandingkan Muhammadiyah, namun antara FPI dan NU terdapat perbedaan yang fundamental di sisi lainnya; *Pertama*, secara *amaliyyah ubudiyyah*, NU dan FPI sama-sama pelaku tradisi (Islam tradisional) baik dalam bentuk *shalawatan*, *tahlilan* ataupun ziarah kubur. *Kedua*, secara *fikrah*, NU dan FPI memiliki kesamaan dalam *fikrah diniyyah* (pemikiran keagamaan) dan sama-sama *ahlussunnah wal jama’ah*. Namun berbeda dalam hal *fikrah siyasah* (pemikiran politik); bagi NU, NKRI adalah final dan dianggap mewakili kepentingan umat Islam tanpa perlunya formulasi syariat Islam. Di sisi lain, FPI menginginkan NKRI bersyariah dengan memasukkan unsur syariah ke dalam tatanan formal bernegara. *Ketiga*, dalam *harakah* (gerakan), NU dan FPI cenderung bertolak belakang, NU dalam gerakannya cenderung moderat dan lentur, sedangkan FPI tidak jarang mempraktekkan kekerasan dalam menjalankan misi *amar ma’ruf nahi munkar*.⁶⁰ Meskipun di antara NU dan FPI memiliki persamaan, namun perbedaan di antara keduanya cenderung tidak dapat dijumpai sehingga gambaran yang terlihat di antara keduanya sarat dengan perselisihan.

Pasca bergulirnya reformasi yang juga ikut melahirkan kelompok-kelompok radikal di Indonesia, FPI telah mengemban beberapa julukan negatif yang disematkan kepadanya, baik sebagai “kelompok intoleran”, “preman berjubah” ataupun “*noisy minority*.”⁶¹ Namun hasil survei Alvara Research Center bulan November hingga Desember 2016 menyimpulkan bahwa popularitas NU, Muhammadiyah dan FPI mendapatkan rating tertinggi dibandingkan Ormas Islam lainnya dalam hal *top of mind* Ormas Islam Indonesia. Urutan pertama adalah NU dengan persentase 69,3% disusul oleh Muhammadiyah 14,5% dan FPI berada di urutan ketiga sebanyak 9%. Sedangkan dalam hal paling banyak dikenal (*total*

awareness Ormas Islam Indonesia) NU mendapatkan 97.0 poin, Muhammadiyah 94.3 poin dan FPI 68.8 poin. Menariknya, popularitas FPI tersebut mampu menyingkirkan Ormas-ormas Islam yang lebih tua umurnya dari FPI, seperti Al-Wasliyah, PERSIS dan beberapa Ormas lainnya.⁶²

Masuknya FPI dalam daftar Ormas terpopuler mengisyaratkan bahwa FPI mulai dapat diterima oleh masyarakat luas—khususnya Islam—yang berbanding lurus dengan hasil survei yang menyimpulkan bahwa pada umumnya masyarakat Islam Indonesia merupakan masyarakat religius dan 95% dari total responden menyatakan bahwa agama memegang peranan penting bagi kehidupan mereka,⁶³ yang tidak jarang pemahaman terhadap Islam dipahami secara radikal, mengingat pesatnya *syi’ar* agama melalui berbagai media. Tentunya ini dapat menjadi salah satu barometer dalam melihat ketertarikan masyarakat terhadap FPI yang konsisten dengan misi ‘*amar ma’ruf nahi munkar*’ meskipun dengan cara yang cenderung “inkonstitusional.”⁶⁴

KH. Said Aqil Siroj selaku ketua Umum PBNU memiliki pandangan tersendiri dalam melihat FPI, dengan *statement* yang menarik ia berpandangan bahwa masyarakat yang tertarik dengan FPI memiliki pemahaman yang belum bagus terhadap Islam.⁶⁵ Meskipun kesimpulan tersebut perlu ditelaah lagi dengan pendekatan yang berbeda. Namun peningkatan pamor FPI pasca bergulirnya Aksi Bela Islam di satu sisi perlu dikaitkan dengan “ketidakadaan jawaban” dari kelompok Islam moderat terhadap problem moral yang terang-terangan menjamur di Indonesia, sedangkan di sisi lain peran pemerintah dianggap kurang memadai dalam menanggulangi ‘kemaksiatan’ yang berlindung di balik HAM. Selain itu, puncak popularitas FPI juga dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengorganisir Aksi Bela Islam. Meskipun mendapat pandangan negatif dari sebagian kalangan dan minim pemberitaan dari media lokal, namun FPI di bawah Habib Rizieq sepertinya berusaha menampilkan sisi feminim organisasinya yang ditunjukkan dengan aksi 212 yang aman dan tertib, meskipun dicurigai memiliki misi terselubung seperti dugaan makar untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

Pasca bergulirnya Aksi Bela Islam, identitas ‘moderat’ yang disandang NU dan Muhammadiyah diuji dengan persoalan krusial terkait kasus penistaan agama yang dialamatkan kepada Ahok. Bagaimanakah Ormas moderat tersebut menyikapinya? Di sinilah identitas moderat mulai kehilangan daya magisnya, sehingga yang tampak adalah inkonsistensi sikap ataupun ketidakjelasan. Dugaan ini berawal dari sikap NU dan Muhammadiyah yang tidak tegas dalam merespon Aksi Bela Islam, tergambar dari seruan moral NU terhadap aksi 411,⁶⁶ ataupun pernyataan sikap Muhammadiyah terhadap aksi 411.⁶⁷

Imbas dari ketidakjelasan sikap NU dan Muhammadiyah secara tidak langsung berdampak kepada “tidak dihiraukannya” himbauan NU dan Muhammadiyah oleh masyarakat dan memilih mengikuti seruan FPI/GNPF-MUI untuk turun jalan menyemarakkan Aksi Bela Islam. Maka sampai pada titik ini identitas “moderat” yang disandang oleh dua Ormas tersebut menjadi “abu-abu” pada hilirnya, bahwa masyarakat NU dan Muhammadiyah tidak berlaku “moderat” setidakya sebagaimana yang diusahakan NU dan Muhammadiyah dalam merespon Aksi Bela Islam.

KH. Ma’ruf Amin sebagai ketua MUI pusat—sekaligus *Rais Aam* PBNU—mengeluarkan pendapat dan sikap keagamaan MUI bahwa Ahok telah menghina al-Qur’an dan ulama. Meskipun sikap MUI ini melahirkan kontroversi dan perdebatan di kalangan pemuka Islam khususnya NU, namun putusan tersebut menjadi legitimasi atas terbentuknya GNPF-MUI yang mengawal kasus Ahok. Sementara itu, NU dan Muhammadiyah secara kelembagaan berupaya netral sehingga tidak terjebak dalam polemik dugaan penistaan agama, bahkan mempercayakan sepenuhnya proses hukum kepada pemerintah.

Di lain sisi, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj tidak memberikan sikap tegas tentang dugaan penistaan agama tersebut,”⁶⁸ bahkan dalam pernyataan resmi sikap PBNU pasca aksi 411, PBNU juga tidak menyinggung apakah Ahok telah melakukan penistaan, namun lebih fokus melirik persoalan etika kepemimpinan yang dilanggar oleh Ahok.⁶⁹ Maka gambaran ini memperlihatkan PBNU secara resmi tidak membuat kesimpulan tentang apakah Ahok telah melakukan penodaan agama sebagaimana pendapat dan sikap keagamaan MUI dibawah KH. Ma’ruf

Amin yang juga merupakan Rais Aam PBNU. Artinya dalam tubuh NU juga terjadi dinamika terkait dugaan penistaan agama ini.

Berangkat dari dinamika di atas, moderatisme sebatas berada di tengah seperti telah menjebak elit NU dan Muhammadiyah dalam menyikapi ada atau tidaknya penodaan agama, sebab yang tampak di permukaan adalah ketiadaan sikap yang tegas, sedangkan di sisi lain, masyarakat NU dan Muhammadiyah membutuhkan sebuah kejelasan melalui Ormasnya agar tidak terjadi perbedaan persepsi di *akar rumput*.

Mashuri Mashuda, selaku kader Muhammadiyah memiliki pandangan tersendiri terhadap kasus Ahok, menurutnya persoalan Ahok merupakan persoalan aqidah, sehingga dibentuklah Komando Kawal Al-Maidah (KOKAM) yang terlepas dari penggunaan atribut dan simbol Muhammadiyah.⁷⁰ Sedangkan di sisi NU juga terdapat Jaringan Muda NU (JMNU) yang memastikan akan bergabung dengan Ormas lainnya pada tanggal 2 Desember 2016.⁷¹ Kondisi ini menandakan adanya ketidaksamaan persepsi dalam NU dan Muhammadiyah, sekaligus melahirkan tanda tanya tentang sejauh mana NU dan Muhammadiyah mampu mengarahkan dan mendidik kader-kadernya untuk menjadi “moderat.” Sebab tidak sedikit dari masyarakat NU dan Muhammadiyah berpartisipasi membanjiri Aksi Bela Islam, bahkan beberapa pondok pesantren yang berafiliasi kepada NU justru mengirimkan santri-santrinya untuk terlibat dalam Aksi Bela Islam.

Mantan ketua Muhammadiyah Buya Syafi’i Maarif dengan lantang menyuarakan penolakan terhadap dugaan penodaan agama ataupun terhadap penyelenggaraan aksi. Menurut Syafi’i Maarif, Ahok tidaklah melakukan penistaan agama, bahkan menurut Syafi’i Maarif “hanya otak sakit saja yang berkesimpulan begitu (bahwa Ahok menista agama).”⁷² Menariknya, kesimpulan yang dilontarkan oleh mantan ketua Muhammadiyah ini mendapatkan respon yang beragam termasuk cacian dan hinaan terhadap beliau di media sosial. Di sisi lain, Amin Rais dan Din Syamsudin yang sama-sama mantan Ketum Muhammadiyah memiliki persepsi yang berbeda tentang kasus Ahok, bahkan Din Syamsudin mengeluarkan pernyataan akan memimpin perlawanan jika Ahok dibebaskan.⁷³

Gambaran lainnya dapat dilihat dari Ketum Muhammadiyah Haedar Nashir cenderung berada dalam posisi netral ketimbang berselisih paham dengan pendahulu-pendahulunya. Namun dalam sebuah kesempatan Haedar Nashir seakan-akan mengafirmasi penodaan agama yang dilakukan oleh Ahok, “tidak boleh siapapun berkata dan berbuat sekehendaknya di negeri ini yang menodai agama dan melukai hati umat beragama. Ini juga pesan moral kepada aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum dengan seadil-adilnya.”⁷⁴ Setidaknya dari potongan ungkapan tersebut, selain ditujukan kepada Ahok, Haedar Nashir sekaligus memberikan himbauan kepada aparat negara agar berlaku adil dan profesional dalam menjalankan kewajibannya.

Berbeda dengan Muhammadiyah, NU menyikapi Aksi Bela Islam cenderung telah memperlihatkan posisi yang tidak sejalan dengan panitia aksi, selain itu meskipun MUI telah mengeluarkan pernyataan adanya penistaan agama, namun NU secara kelembagaan tetap netral dalam menyikapinya meskipun dengan penekanan melarang masyarakat NU untuk ikut turun dalam Aksi Bela Islam, meskipun kenyataannya dalam elit NU juga terdapat perdebatan di tengah rencana akan digelarnya aksi jilid III, dengan keluarnya fatwa tentang tidak sahnya sholat Jumat di jalan.

Gus Mus seorang tokoh NU juga mengeluarkan pendapat bahwa sholat Jum’at di jalan adalah bid’ah besar.⁷⁵ Namun demikian, fatwa tersebut juga ditanggapi berbeda oleh Lembaga *Bathsul Masail* NU (LBMNU) Jember yang menyebut bahwa fatwa tersebut tidak tepat dan menimbulkan preseden buruk bagi NU.⁷⁶ Selain itu, Gus Sholah yang merupakan keturunan KH. Wahid Hasyim juga menanggapi fatwa tersebut bahwa shalat di jalan itu boleh jika masjid tidak bisa menampung.⁷⁷ Meskipun persoalan sholat di jalan melahirkan perbedaan pendapat dalam tubuh NU sebagai sesuatu yang lumrah. Namun jika dikaitkan dengan “Aksi Bela Islam” tentunya perbedaan pemahaman ini memperlihatkan tidak kokohnya sikap moderat dalam tubuh NU khususnya ketika dihadapkan oleh semacam Aksi Bela Islam.

Dilihat dari sepak terjang NU dan Muhammadiyah—meskipun sama-sama menyanggah identitas moderat—selama proses Aksi Bela Islam, antara dua

Ormas tersebut juga terlihat perbedaan sikap. Muhammadiyah misalnya, meskipun secara kelembagaan telah melarang masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam aksi, namun Muhammadiyah juga tidak melarang kebebasan berekspresi melalui demonstrasi jika warganya ikut berpartisipasi dalam aksi tersebut, bahkan beberapa Masjid Muhammadiyah dijadikan sebagai titik awal keberangkatan peserta aksi,⁷⁸ di mana hal ini juga diamini oleh salah satu Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah bahwa Muhammadiyah tidak berada dalam posisi melarang atau membolehkan anggotanya/masyarakatnya untuk berpartisipasi.⁷⁹

Muhammadiyah hanya tidak setuju jika Muhammadiyah secara kelembagaan dibawa dalam wacana demonstrasi yang jauh dari sejarah pergerakannya, sekaligus mengindikasikan “mesin” Muhammadiyah mengamini tuntutan GNPF-MUI atas dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Sedangkan NU cenderung tidak sependapat dengan Aksi Bela Islam yang sifatnya demonstrasi, bahkan ada anggapan bahwa aksi 212 merupakan aksi bayaran,⁸⁰ dengan berbagai motif, baik itu motif menggantikan Pancasila hingga aksi makar.⁸¹

Keterlibatan NU dan Muhammadiyah dalam Aksi Bela Islam berada dalam sudut pandang yang berbeda, di mana perbedaan tersebut sama-sama memperlihatkan sikap yang “abu-abu”. Jika dilihat dalam perspektif moderat yang diartikan berada di antara dua arus, maka Aksi Bela Islam berhasil memperlihatkan bahwa menjadi moderat sejalan dengan ketidakjelasan sikap yang diperlihatkan NU dan Muhammadiyah, di mana kondisi tersebut berimbas kepada pemahaman yang berbeda oleh masyarakatnya. Sehingga setiap komponen yang ada memiliki pemahaman masing-masing terhadap kasus Ahok ataupun terhadap Aksi Bela Islam, di mana muaranya melahirkan perdebatan yang tidak saling menguatkan. Di sisi lain, FPI dengan koalisi konservatifnya cenderung mampu mengolah perbedaan yang ada menjadi sebuah kekuatan yang solid. Maka di mana *goal* moderat?

E. Kesimpulan

Historitas Aksi Bela Islam 212 tidaklah berdiri sendiri, ia hadir bersamaan dengan rekam jejak yang melatarinya yang dirangkum dalam dua persepsi.

Pertama, Secara kasat mata, Aksi bela Islam merupakan bentuk penolakan terhadap Ahok—selain adanya indikasi penistaan agama—sebagai Gubernur dan Calon Gubernur Jakarta pada Pemilu pada berikutnya. Latar Ahok sebagai Tionghoa, minoritas non-Muslim menjadi salah satu sebab tidak diterimanya kepemimpinan Ahok oleh Islam konservatif yang mengidamkan dominasi Islam dalam pemerintahan. Ketidaksenangan ini melahirkan bermacam persoalan hingga lahirnya momen di mana Ahok dianggap telah melakukan penistaan agama yang memantik gelombang Aksi Bela Islam dengan tuntutan kepada pemerintah untuk memberi hukuman dan penahanan kepada Ahok yang dianggap menista agama dan ulama. *Kedua*, secara tersirat Aksi Bela Islam memiliki agenda—apakah spontan atau terencana—yang jauh lebih besar arahnya dari hanya sekedar memenjarakan Ahok. Yakni adanya kemungkinan upaya untuk menyusun kekuatan politik sebagai “gerakan dari bawah” untuk mengikat masyarakat kepada konservatisme—sekalius membangun kekuatan politik melalui pendekatan konstitusional dengan oposisi pemerintah.

NU dan Muhammadiyah secara kelembagaan “tersingkirkan” dalam Aksi Bela Islam. Himbuan Ormas moderat tersebut tidak begitu dihiraukan oleh masyarakat, dibuktikan dengan beragam aksi yang lahir di Jakarta dan diikuti oleh aksi serupa di beberapa daerah di Indonesia. Selain itu tanpa disadari, NU dan Muhammadiyah memiliki sumbangsih dalam menggemukkan aksi tersebut, kualitas “moderat” NU dan Muhammadiyah dalam menyikapi Aksi Bela Islam justru memperlihatkan inkonsistensi. Sedangkan di sisi lain, Aksi Bela Islam justru mendongkrak popularitas FPI yang konsisten dengan pergerakannya. Namun demikian, NU dan Muhammadiyah berhasil menyelamatkan lembaganya masing-masing, meskipun dihadapkan dengan kondisi yang nyaris berseberangan intra Ormas masing-masing. Meskipun NU secara kelembagaan telah berusaha menampilkan posisi netral dalam menyikapi kasus penistaan agama, namun sikap elit NU cenderung tidak berada dalam posisi yang netral, digambarkan dengan kritikan tajam kepada gerakan Aksi Bela Islam. Sedangkan elit Muhammadiyah justru sebaliknya, meskipun berusaha untuk berposisi netral, namun pada praktiknya justru terjebak pada keberpihakan.

F. Daftar Pustaka

- Assyaukanie, Luthfi. 2011. *Ideologi Islam dan utopia: Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: FREEDOM INSTITUTE.
- Asyari, Suaidi. 2010. *Nalar Politik NU & Muhammadiyah: Over Crossing Java Sentris*, terj. Mohammad Rapik, Yogyakarta: LKIS.
- Basyir, Kunawi. 2016. “Idiologi Gerakan Politik Islam” *Al-Tahrir*, Vol. 16, No. 2.
- Bruinessen, Martin Van. 2002 “Genealogies of Islamic radicalism in post-Suharto Indonesia,” *South East Asia Research*, Vol. 10, No. 2.
- Darmawijaya. 2015. “Islam dan Kekuasaan Orde Baru,” *Sosiologi Reflektif*, Vol 10, No. 1.
- Esposito, John L, Ibrahim Kalin. 2011. *Islamophobia: The Challenge of Pluralism in the 21st Century*, New York: Oxford University Press, Inc.
- Fadl, Khaled Abou El. 2007. *The Great Theft: Wrestling Islam From the Extremist*, New York: Harper Collins Publisher.
- Faisal Bakti, Andi. 2005. “Islam and Modernity: Nurcholish Madjid’s Interpretation of Civil Society, Pluralism, Secularization and Democracy” *Asian Journal of Social Science*, Vol 33, No. 3.
- Fealy, Greg. 2009. *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*, Yogyakarta: LkiS.
- Geertz, Clifford. 1983. *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, terj. Aswab Mahasin, Jakarta: Pustaka Jaya.
- Hashim Kamali, Muhammad. 2015. *The Middle Path of Moderation in Islam: The Quranic Principle of wasatiyyah*, New York: Oxford University Press.
- Iqbal, Muhammad dan Amin Husein Nasution. 2015. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group.
- J. G. Kaptein, Nico (Ed). 2003. *Kekacauan dan Kerusuhan: Tiga Tulisan Tentang Pan-Islamisme di Hindia-Belanda Timur pada Akhir Abad Kesembilan Belas dan Awal Abad kedua Puluh*, terj. Lillian D. Tedja Sudhana, Jakarta: INIS.

- Juharmen. 2014. “Relasi Kebijakan Pemerintahan Terkait Religious Diversity dan Kekerasan atas nama Islam di Indonesia” *Jurnal Islam & Demokrasi*, Vol I, No 3.
- Jurdi, Syarifuddin. 2008. *Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lapidus, Ira M. 2000. *Sejarah Sosial Umat Islam Bagian ketiga*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Latif, Yudi. 2007. *Dialektika Islam: Tafsir Sosiologis Atas Sekularisasi dan islamisasi di Indonesia*, Yogyakarta: Jalasutra.
- Maarif, Ahmad Syafii. 2017. *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: studi Tentang Perdebatan dalam Konstituante*, Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Murod Al-Barbasy, Ma'mun. 2018. *Politik Perda Syariat : Dialektika Islam dan Pancasila di Indonesia*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Najib Burhani, Ahmad. 2016. “Aksi Bela Islam; Konservatisme dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan” *MAARIF*, Vol 11. No 2.
- Nashir, Haedar. 2013. *Islam Syariat: Reproduksi Salafiah Ideologis di Indonesia*, Bandung: Mizan.
- Nashir, Haedar. 2017. *Memahami Ideologi Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Nawawi, Hadari. 1987. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: UGM Press.
- Qardhawi, Yusuf. 2017. *Islam jalan Tengah: Menjauhi Sikap Berlebihan dalam Beragama*, terj. Alwi A.M, Bandung: Mizan.
- Rizky Mardhatillah Umar, Ahmad. 2016. “A Genealogy of Moderate Islam: Governmentality and Discours of Islam in Indonesia’s Foreign Policy” *Studia Islamika*, Vol. 23, No. 3.
- Sitompul, Agussalim. 2008. *Usaha-Usaha mendirikan Negara Islam dan Pelaksanaan Syariat Islam di Indonesia*, Jakarta: CV Misaka Galiza.
- Sjazali, Munawir. 1993. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI-Press.

- Solikin, Ahmad. 2018. “Gerakan Politik Islam di Indonesia Pasca Aksi Bela Islam Jilid I, II dan III” *MADANI Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol 10 No. 1.
- Suminto, Abiq. 1985. *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3S.
- Wahid, Marzuki dan Rumaiddi. 2001. *Fiqh Mazhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Lkis.
- Woodward, Mark dan Amanah Nuris. 2016. “judul Quo Fadis FPI dalam Aksi Bela Islam” *Jurnal Maarif*, Vol. 11, No. 2.

Internet

- <http://indoprogress.com/2016/12/aksibelaislamantarabelaagamadanbelaoligarki/>
- <https://www.panjimas.com/news/2016/11/02/muhammadiyah-keluarkan-pernyataan-sikap-tentang-aksi-4-november/>
- http://www.libforall.org/lfa/media/2009/Gatra_The-NU-Muhammadiyah-and-Pancasila_04-06-09.pdf
- <http://www.nu.or.id/post/read/72476/seruan-moral-pbnu-menyikapi-aksi-4-november>
- <http://www.suaramuhammadiyah.id/2016/12/03/haedar-nashir-aksi-212-menggugah-kesadaran-kehidupan-berbangsa/>
- <http://www.teropongsenayan.com/53139-inilah-upaya-penggembosan-aksi-umat-islam-iii>
- <https://crcs.ugm.ac.id/id/berita-utama/10348/haruskah-fpi-dibubarkan.html>
- <https://epdf.tips/ideologi-islam-dan-utopia-tiga-model-negara-demokrasi-di-indonesia.html>
- <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/10/05/16541921/survei.median.masayarakat.akui.kinerja.ahok.tetapi.tak.suka.karena.arogan>
- <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/30/20222171/survei.nu.muhammadiyah.dan.fpi.tiga.besar.top.of.mind.organisasi.islam.di.indonesia>
- <https://nasional.sindonews.com/read/1159599/13/ipw-nilai-pelarangan-aksi-212-bentuk-pembangkangan-polisi-daerah-1480562878>

<https://nasional.tempo.co/read/822690/din-syamsuddin-kalau-ahok-lepas-saya-pimpin-perlawanan>
<https://news.detik.com/berita/d-3356773/lbm-nu-jember-berbeda-sikap-dengan-fatwa-pbnu-soal-salat-jumat-di-jalan>
<https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-38101093>
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161104160100-20-170328/selain-jakarta-sejumlah-daerah-juga-gelar-aksi-tolak-ahok>
<https://www.idntimes.com/news/indonesia/rizal/nu-keluarkan-fatwa-shalat-jumat-di-jalan-umum-hukumnya-tidak-sah/full>

Catatan

¹ <http://indoprogress.com/2016/12/aksibelaislamantarabelaagamadanbelaoligarki/>, diakses 14 September 2017.

² Mark Woodward dan Amanah Nuris, “Quo Fadis FPI dalam Aksi Bela Islam,” *Jurnal Maarif*, Vol. 11, No. 2. Desember 2016.

³

⁴ Ahmad Najib Burhani, “Aksi Bela Islam; Konservatisme dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan,” *MAARIF*, Vol 11. No 2, h. 18.

⁵ Muhammad Imarah, *Perang Terminologi Islam Versus Barat*, (Jakarta: Logos, 1989), h. 7, dalam Kunawi Basyir “Idiologi Gerakan Politik Islam,” *Al-Tahrir*, Vol. 16, No. 2 November 2016, h. 349.

⁶ Mark Woodward dan Amanah Nuris, “Quo Fadis FPI dalam Aksi Bela Islam,” *MAARIF*, Vol. 11, No. 2-Desember 2016.

⁷ Ahmad Solikin, “Gerakan Politik Islam di Indonesia Pasca Aksi Bela Islam Jilid I, II dan III,” *MADANI Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol 10 No. 1- 2018, h. 23.

⁸ Ahmad Najib Burhani, Aksi Bela Islam.... h. 19. Lihat juga dalam Rinaldi Ikhsan, “Muhammadiyah yang bukan Muhammadiyah” <https://geotimes.co.id/kolom/agama/muhammadiyah-yang-bukan-muhammadiyah/>, diakses tanggal 25 November 2017

⁹ Ahmad Najib Burhani, Aksi Bela Islam.... h. 27

¹⁰ Deliar Noer, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia, 1900-1942* (Singapura, Newyork: Oxford University Press, 1973) dalam Luthfi Assyaukanie, *Ideologi Islam dan Utopia: Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: FREEDOM INSTITUTE, 2011), h. 6. Versi online dalam <https://epdf.tips/ideologi-islam-dan-utopia-tiga-model-negara-demokrasi-di-indonesia.html>, diakses 7 April 2018.

¹¹ *Ibid*,

¹² Nazih Ayubi, “Islamic State,” dalam *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*. (Oxford: Oxford University Press, 1995), h. 324, dalam Kunawi basyir, “Idiologi Gerakan Politik Islam di Indonesia” *Al-Tahrir*, Vol. 16, No. 2 November 2016, h. 341.

¹³ *Ibid*,

¹⁴ Khaled Abou El Fadl, *The Great Theft: Wrestling Islam From the Extremist*, (New York: Harper Collins Publisher, 2007), h. 16.

¹⁵ Khaled Abou El Fadl, *The Great Theft...*, h. 17-18.

¹⁶ Muhammad Hashim Kamali, *The Middle Path of Moderation in Islam: The Quranic Principle of wasatiyyah* (New York: Oxford University Press, 2015), h. 9.

- ¹⁷ Muhammad Hashim Kamali, *The Middle Path...*, h. 12
- ¹⁸ *Ibid.*
- ¹⁹ James Petras “The Washington—‘Moderate Islam’ Alliance: Containing rebellion: Defending Empire,” dalam Muhammad Hashim Kamali, *The Middle Path...*, h. 12
- ²⁰ <https://www.merdeka.com/politik/4-alasan-ahok-keluar-dari-gerindra/ahok-sudah-tak-bisa-menaati-keputusan-gerindra.html>, diakses 3 April 2018.
- ²¹ <https://news.detik.com/berita/d-4419683/ahok-resmi-jadi-kader-pdip>, lihat juga <https://nasional.tempo.co/read/1173785/ahok-masuk-pdip-ketua-psi-istri-baru-partai-baru-selamat-pak/full&view=ok>, diakses tanggal 14 Agustus 2019.
- ²² <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/10/05/16541921/survei.median.masyarakat.akui.kine.rja.ahok.tetapi.tak.suka.karena.arogan>, diakses 6 April 2018.
- ²³ <https://www.merdeka.com/jakarta/ikut-demo-fpi-ustaz-kondang-ini-tolak-keras-ahok-jadi-gubernur.html>, diakses 8 April 2018.
- ²⁴ <https://www.panjimas.com/news/2014/10/03/fpi-dalil-quran-mengharamkan-orang-kafir-memimpin-orang-islam/>, diakses 5 Maret 2018.
- ²⁵ <https://metro.sindonews.com/read/922240/31/ahok-hari-ini-kita-kirim-surat-minta-fpi-dibubarkan-1415607262>, diakses 27 Desember 2017.
- ²⁶ <https://news.detik.com/berita/3233074/kpk-nyatakan-tak-ada-korupsi-di-sumber-waras-ini-komentar-ahok>, diakses 3 Januari 2018
- ²⁷ <http://suarajakarta.co/news/politik/izin-reklamasi-17-pulau-ke-agung-podomoro-ahok-dapat-jatah/>, diakses 27 Desember 2018.
- ²⁸ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160429104154-20-127492/ahok-disebut-cetak-sejarah-penggusuran-paling-brutal>, diakses 3 Januari 2018.
- ²⁹ <https://kumparan.com/@kumparannews/rangkuman-aksi-massa-islam-dari-1410-hingga-112>, diakses 21 Mei 2018.
- ³⁰ <https://www.suara.com/news/2016/10/14/172957/demo-ormas-islam-bubar-sebelum-pergi-rizieq-keluarkan-ancaman>, diakses 17 April 2018.
- ³¹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161104160100-20-170328/selain-jakarta-sejumlah-daerah-juga-gelar-aksi-tolak-ahok>, diakses 28 Juni 2018.
- ³² <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37996601>, diakses 3 Mei 2018.
- ³³ <https://www.voaindonesia.com/a/jokowi-ada-aktor-politik-tunggangi-demo-/3581778.html>, diakses 12 Mei 2018.
- ³⁴ <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/05/10/opp5r4330-ini-7-rangkaian-aksi-bela-islam-sebelum-ahok-divonis-2-tahun-penjara>, diakses 2 Juni 2018.
- ³⁵ <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/11/18/ogtojh382-habib-rizieq-jamin-aksi-bela-islam-iii-berjalan-super-damai>, diakses 21 Juni 2018.
- ³⁶ https://news.detik.com/berita/d-3352491/habib-rizieq-tak-boleh-ada-yang-larang-demo-sekalipun-itu-presiden?_ga=2.229131221.836048181.1546390252-354566330.1468292306, diakses 6 Juli 2018.
- ³⁷ <https://tirto.id/mui-fpi-polri-sepakat-demo-damai-212-digelar-di-monas-b5Qs>, diakses 20 Mei 2018.
- ³⁸ <https://www.viva.co.id/indepth/fokus/900655-mempertanyakan-jeratan-pasal-makar-aksi-bela-islam>, diakses 28 Juli 2018.
- ³⁹ <https://www.idntimes.com/news/indonesia/rizal/nu-keluarkan-fatwa-shalat-jumat-di-jalan-umum-hukumnya-tidak-sah/full>, diakses 12 Juni 2018.
- ⁴⁰ <https://nasional.sindonews.com/read/1159599/13/ipw-nilai-pelarangan-aksi-212-bentuk-pembangkangan-polisi-daerah-1480562878>, diakses 20 Januari 2018.
- ⁴¹ <http://www.teropongsenayan.com/53139-inilah-upaya-penggemboan-aksi-umat-islam-iii>, diakses 13 April 2018.
- ⁴² Kalkulasi jumlah peserta aksi 212 masih menjadi misteri, karen tidak terdapat kata pasti terhadap jumlahnya. Ada yang menghitung dengan hasil ratusan ribu, lihat <https://news.detik.com/berita/d-3363747/pria-ini-hitung-jumlah-massa-di-aksi-2-desember-begini-hasilnya>, dan ada yang mengklaim hingga jutaan orang, lihat,

- <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/12/05/ohou27415-menghitung-jumlah-peserta-aksi-212>, dikases 27 Juli 2018.
- ⁴³<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/12/02/ohjb1b301-sejak-subuh-muslimah-hti-gabung-dengan-aksi-damai-212>, diakses 25 Juli 2018.
- ⁴⁴ <http://persis.or.id/himbauan-pp-persis-tentang-aksi-bela-islam-2-12-abi-2-12/>, diakses 14 Juni 2018.
- ⁴⁵ <http://muslimtoday.net/kader-wahdah-islamiah-dari-aceh-hingga-papua-hadiri-aksi-bela-islam-3/>, diakses 13 Juli 2018.
- ⁴⁶ <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/11/29/ohk3d301-pks-ajak-masyarakat-berpartisipasi-dalam-aksi-bela-islam-212>, diakses 20 Juli 2018.
- ⁴⁷ <https://tirto.id/motif-aksi-bela-islam-iii-tak-hanya-soal-ahok-b6Bn>, diakses 21 Juli 2018.
- ⁴⁸ Ahmad Najib Burhani, “Aksi Bela Islam...” h. 23-24.
- ⁴⁹ *Ibid*, h. 25.
- ⁵⁰ <http://koperasisyariah212.co.id/category/berita/>, diakses tanggal 3 Agustus 2018.
- ⁵¹ Firdaus Syam dalam Taufik Abdullah dkk (ed.), *Indonesia dalam Arus Sejarah...*, h. 405
- ⁵² <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/02/11071741/prabowo-kepada-alumni-212-ini-sebuah-kehormatan-buat-saya>, diakses 22 Juli 2018.
- ⁵³ Khaled Abou El Fadl, *The Great Theft: Wrestling Islam From the Extremist*, (New York: Harper Collins Publisher, 2007), h. 16.
- ⁵⁴ John L. Esposito, Ibrahim Kalin, *Islamophobia: The Challenge of Pluralism in the 21st Century*, (New York: Oxford University Press, Inc), h. vii.
- ⁵⁵ Ahmad Rizky Mardhatillah Umar “A Genealogy of Moderate Islam: Governmentality and Discours of Islam in Indonesia’s Foreign Policy” *Studia Islamika*, Vol. 23, No. 3, 2016, h. 401-402
- ⁵⁶ Dikutip dari beberapa sumber dalam Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*, (Yogyakarta: LkiS, 2009), h. 77-82. Lihat juga, Yusuf Qardhawi, *Islam jalan Tengah: Menjauhi Sikap Berlebihan dalam Beragama*, terj. Alwi A.M, (Bandung: Mizan, 2017), h. 22.
- ⁵⁷ *Ibid*, h. 78.
- ⁵⁸ Haedar Nashir, *Memahami Ideologi Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017). Cet. 4, h. 36.
- ⁵⁹ Haedar Nashir, *Memahami Ideologi Muhammadiyah...*, h. 133-134.
- ⁶⁰ M. Kholid Syeirazy, “NU dan FPI dalam tiga matra.” Diakses dari <http://www.nu.or.id/post/read/78143/nu-dan-fpi-dalam-tiga-matra>. FPI menganggap bahwa yang mereka lakukan dalam memberantas kemaksiatan merupakan bentuk ketegasan mereka dalam *amar ma’ruf nahi munkar* yang selama ini tidak mendapatkan perhatian oleh kalangan NU ataupun Muhammadiyah. Lihat, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170818084403-20-235550/pendiri-fpi-dan-mimpi-100-persen-indonesia-bersyariat>, diakses 25 Juli 2018.
- ⁶¹ Lihat, CRCS “Haruskah FPI dibubarkan” diakses dari <https://crs.ugm.ac.id/id/berita-utama/10348/haruskah-fpi-dibubarkan.html>, diakses 28 Agustus 2018.
- ⁶² <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/30/20222171/survei.nu.muhammadiyah.dan.fpi.tiga.besar.top.of.mind.organisasi.islam.di.indonesia>, diakses 26 Juli 2018
- ⁶³ Temuan hasil survei Nasional dari 1626 responden Muslim di 34 Profinsi pada bulan Desember 2016. <https://nasional.tempo.co/read/841234/survei-alvara-95-persen-muslim-indonesia-religius/full&view=ok>, diakses 22 Juli 2018.
- ⁶⁴
- ⁶⁵ <https://nasional.tempo.co/read/841363/popularitas-fpi-tinggi-bersanding-nu-dan-muhammadiyah/full&view=ok>, diakses 5 Agustus 2018.
- ⁶⁶ <http://www.nu.or.id/post/read/72476/seruan-moral-pbnu-menyikapi-aksi-4-november>, diakses 20 Juli 2018.
- ⁶⁷ <https://www.panjimas.com/news/2016/11/02/muhammadiyah-keluarkan-pernyataan-sikap-tentang-aksi-4-november/>, diakses 20 Juli 2018.
- ⁶⁸ Diakses dari <http://www.nu.or.id/post/read/72619/apakah-ahok-menista-agama-ini-penjelasan-ketum-pbnu>, diakses 13 Juni 2018.
- ⁶⁹ Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/11/07/og9shj328-pernyataan-lengkap-nu-soal-kasus-ahok>, diakses 1 Juli 2018.

⁷⁰Diakses dari <https://www.acehtrend.com/2016/11/28/aksi-bela-islam-dan-runtuhnya-elit-ormas-islam-nu-dan-muhammadiyah/> diakses 5 juli 2018.

⁷¹<https://www.goriau.com/berita/baca/berbeda-dengan-pbnu-jaringan-muda-nahdhatul-ulama-pastikan-ikut-aksi-bela-islam-iii.html>, diakses 20 Juli 2018.

⁷²<http://medan.tribunnews.com/2016/11/07/buya-syafii-lontarkan-pernyataan-mencengangkan-menyasar-ahok>, diakses 12 April 2018.

⁷³<https://nasional.tempo.co/read/822690/din-syamsuddin-kalau-ahok-lepas-saya-pimpin-perlawanan>, diakses 20 April 2018.

⁷⁴<http://www.suaramuhammadiyah.id/2016/12/03/haedar-nashir-aksi-212-menggugah-kesadaran-kehidupan-berbangsa/>, diakses 16 April 2018.

⁷⁵ <https://www.nu.or.id/post/read/73189/gus-mus-shalat-jumat-di-jalan-raja-bidah-besar>, diakses 21 Juli 2018.

⁷⁶<https://news.detik.com/berita/d-3356773/lbm-nu-jember-berbeda-sikap-dengan-fatwa-pbnu-soal-salat-jumat-di-jalan>, diakses 21 Juli 2018.

⁷⁷ <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-38101093>, diakses 22 Juli 2018.

⁷⁸<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/11/30/ohgh53354-muhammadiyah-bantah-dorong-mobilisasi-massa-aksi-212>, diakses 16 Juni 2018.

⁷⁹ <http://seputartuban.com/muhammadiyah-bebaskan-anggotanya-menyikapi-aksi-212/>, diakses 27 Juli 2018.

⁸⁰ <https://www.youtube.com/watch?v=gMszhAxsBPQ>, diakses 28 Maret 2018.

⁸¹ <https://www.kiblat.net/2017/06/10/komentari-aksi-212-said-aqil-sebut-peserta-bayaran-dan-sholat-jumat-tidak-sah/>, diakses 27 Juli 2018.